

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lembaga

4.1.1 Sejarah Lembaga

Sentra Galih Pakuan Bogor berdiri tahun 1982. Awal mula berdiri sebagai lembaga bernama Rehabilitasi Sosial ANKN (Anak Nakal dan Korban Narkotika) Innabah Ciseeng Bogor pada tahun 1983, kemudian berganti nama menjadi Panti Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika (PRSKN) Putat Nutug Parung Bogor dibawah proyek Seksi RPS ANKN Kantor Wilayah Departemen Sosial (saat ini Kementerian sosial) Provinsi Jawa Barat. Program Rehabilitasi Sosial kepada anak nakal dan korban narkotika pada saat itu dilakukan melalui metode TQN (Toreqat Qodiriyah Naqsabandiyah) seperti mandi malam, dzikir, sholat wajib dan sunat, serta pendekatan pekerjaan sosial. Beberapa pengembangan program kemudian dilakukan seperti jalinan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, Kepolisian Resort Bogor, Puskesmas Ciseeng Bogor, Dinas Sosial di lingkungan Jawa Barat, dan Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Bogor. Pada tahun 1994 dikeluarkan SK Dirjen Bin-Rehsos Nomor: 6/KEP/BRS/IV/1994 tepatnya tanggal 26 April 1994, sehingga PRSKN Putat Nutug berubah nama menjadi PSPP “Galih Pakuan”. Pada tanggal 9 Agustus 2018, PSPP “Galih Pakuan” Bogor mengalami perubahan nomenklatur lagi menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psiktropika dan Zat adiktif lainnya (BRSKP NAPZA) “Galih Pakuan” di Bogor sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2018 (yang mendasari berdirinya lembaga ini) Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Korban Penyalahguna NAPZA di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Pada awal tahun 2002 diperkenalkan program RSKPN melalui metode *Therapeutic Community*, kemudian metode tersebut ditetapkan sebagai metode pengganti TQN dalam melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi korban Penyalahguna NAPZA. Pelaksanaan metode *Therapeutic Community* (TC) diselaraskan dengan pendekatan ilmu pekerjaan sosial. Metode ini dilakukan sampai dengan saat ini. Selain metode TC, PSPP “Galih Pakuan” (saat ini BRSKP NAPZA “Galih Pakuan” Di Bogor) telah mengalami beberapa pengembangan program seperti adanya program Shelter Work Shop yang dimulai pada tahun 2008, lalu pada tahun 2013 dilakukan pengembangan penjangkauan dan intervensi kasus NAPZA di masyarakat, pendampingan kasus NAPZA yang berhadapan dengan hukum, membuka layanan media informasi, pengaduan dan konsultasi, melakukan pembangunan sarana dan melakukan program terapi sosial dan mental bagi korban penyalahguna NAPZA di alam terbuka melalui kegiatan Outbound. Tahun 2017 dilakukan pengembangan Rehabilitasi Sosial bagi Korban Penyalahguna NAPZA yang disertai dengan gangguan kejiwaan (dual diagnosis) melalui program khusus *Facility In Special Treatment* (FIST). Kemudian pada tahun 2019, BRSKP NAPZA “Galih Pakuan” Di Bogor kembali mengembangkan model pelayanannya melalui penambahan facility Entry House.

4.1.2 Badan Hukum

Pada tahun 1994 Galih Pakuan Bogor berdiri berdasarkan SK Dirjen Bin-Rehsos Nomor: 6/KEP/BRS/IV/1994, tepatnya 26 April 1994 sehingga PRSKN Putat Nutug berubah nama menjadi PSPP “Galih Pakuan”. Untuk yang terbaru Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Korban Penyalahguna NAPZA di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

4.1.3 Visi dan Misi

4.1.3.1 Visi

“BRSKPN Galih Pakuan Bogor sebagai pusat Pelayanan, Perlindungan, dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang berstandar Nasional, Profesional, dan Berkualitas.”

4.1.3.2 Misi

1. Menyelenggarakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan NAPZA dengan pendekatan multi-intervensi holistic sistematis.
2. Menyelenggarakan pengkajian pengembangan model pelayanan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA.
3. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait wilayah cakupan kerja Balai.
4. Melaksanakan Penjangkauan Penerima Manfaat lintas wilayah dan lintas nasional.
5. Menyelenggarakan Rakor, Bimtap, dan Bimtek bagi IPWL dan masyarakat sebagai bentuk penguatan kapasitas kelembagaan.
6. Menyelenggarakan layanan Respon Kasus.

4.1.4 Tugas Pokok, Fungsi, dan Tujuan Lembaga

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Korban Penyalahgunaan NAPZA di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, BRSKP NAPZA memiliki tugas melaksanakan rehabilitasi sosial kepada korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

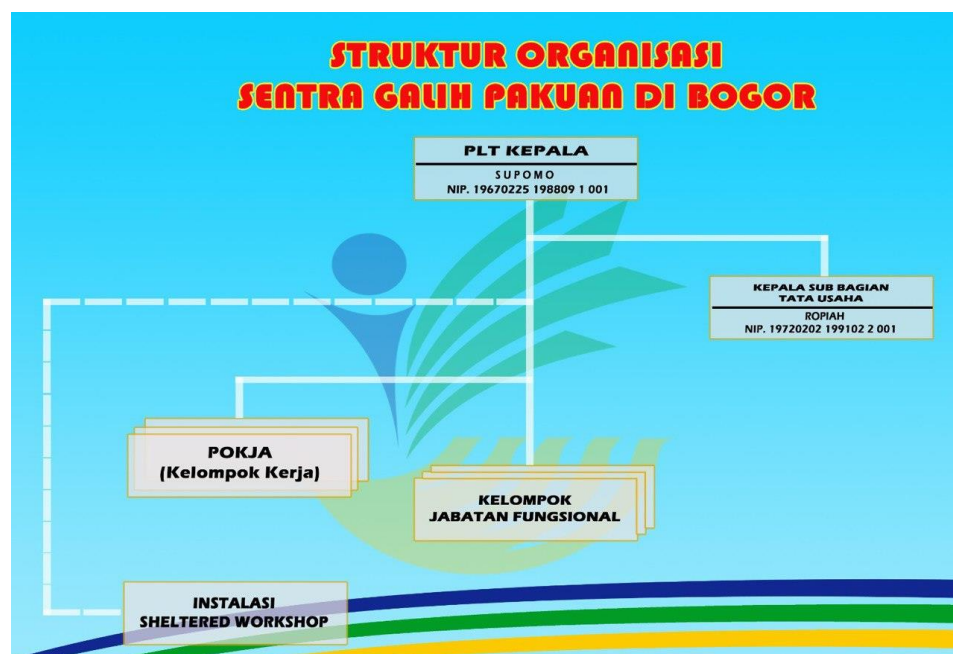
Sementara itu fungsi dari Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA “Galih Pakuan” antara lain:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan laporan.

2. Pelaksanaan registrasi, observasi, identifikasi, penyelenggaraan asrama dan pemeliharaan serta penetapan diagnose social dan perawatan medis.
3. Pelaksanaan bimbingan fisik, mental, social dan keterampilan.
4. Pelaksanaan resosialisasi, penyaluran, dan bimbingan lanjut.
5. Pemberian informasi dan advokasi.
6. Pengkajian dan pengembangan standar pelayanan dan rehabilitasi sosial.
7. Pengelolaan urusan tata usaha.

Tujuan program pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA, yaitu untuk memulihkan kondisi fisik, mental, psikis, sosial, sikap, dan perilaku korban penyalahgunaan NAPZA, agar mereka mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam keluarga maupun masyarakat.

4.1.5 Struktur Organisasi Lembaga



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Sentra Galih Pakuan Bogor

4.1.6 Sumber Daya Manusia Pelaksana

Dalam menjalankan program rehabilitasi sosial diperlukan kerjasama dari berbagai latar belakang profesi dan fungsi yang mendukung kegiatan rehabilitasi sosial antara lain:

1. Pejabat Struktural
2. Jabatan Fungsional Tertentu
3. Jabatan Fungsional Umum
4. Konselor Adiksi
5. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Jumlah SDM Pelaksana yang ada di Sentra Galih Pakuan Bogor berjumlah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Jumlah SDM di Sentra Galih Pakuan Bogor Tahun 2023

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Aparatur Sipil Negara (ASN)	58 Orang
2.	PPNP	23 Orang
3.	Tenaga Kontrak	10 Orang
4.	Konselor	14 Orang

4.1.7 Fasilitas Lembaga

Sentra Galih Pakuan berdiri diatas tanah seluas 71.450m² digunakan untuk bangunan dan sarana umum, selebihnya digunakan untuk lahan pertanian dan perkebunan. Sentra Galih Pakuan memiliki fasilitas sarana dan prasana yang cukup lengkap dalam menunjang kelancaran program yang sesuai dengan standar rehabilitasi sosial yang komprehensif. Fasilitas di BRSKPN Galih Pakuan terdiri dari:

1. Asrama Primary (Dormitory 1 dan 2)
2. Asrama Re-Entry (I, II, III)
3. Asrama After Care
4. Ruang Pekerja Sosial
5. Gelanggang Olahraga

6. Gedung Pelatihan Vokasional
7. Dapur
8. Ruang Makan
9. Ruang Rekreasi
10. Ruang Medis
11. Ruang Perpustakaan
12. Wisma Tamu
13. Rumah Dinas
14. Perpustakaan
15. Ruang Data dan Informasi
16. Ruang Pos Jaga
17. Aula Pertemuan
18. Masjid
19. Taman
20. *Coffee Shop*
21. Kolam Ikan
22. Pendopo

4.1.8 Prosedur Penerimaan Klien

1. Prosedur Pengantaran, proses layanan administrasi dilaksanakan pada jam dan hari kerja (Senin-Jumat, pukul 08.00-16.00 WIB). Bagi pengantar khusus dari luar wilayah yang datang di luar jam dan hari kerja, disediakan wisma tamu sampai menunggu proses administrasi penerimaan dilakukan. Calon klien harus didampingi oleh keluarga atau wali.
2. Identifikasi, calon klien datang bisa dari beberapa sumber, yaitu rujukan dan outreach. Klien yang dirujuk biasanya dari orangtua atau keluarga yang mengantar langsung. Selain itu bisa juga ada rujukan Nomor Jabatan Jumlah 1 Aparatur Sipil Negara (ASN) 58 orang 2 PPNP 23 orang 3 Tenaga Kontrak 10 orang 4 Konselor 17 orang 52 dari IPWL (Institusi Penerima Wajib Laporan) mereka

adalah LKS yang bergerak di rehabilitasi penyalahgunaan NAPZA, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, bapas, dan Dinas Sosial. Biasanya yang dari kepolisian mereka ditangkap polisi dengan barang bukti dan memperoleh kesempatan untuk mendapatkan rehabilitasi dengan diantar ke Galih Pakuan yang konteksnya sebagai penyalahguna bukan pengedar. Kemudian yang dari outreach yaitu dari Pekerja Sosial, TRC (Tim Reaksi Cepat), PSM, dan RGM.

3. Verifikasi, kemudian calon klien diterima oleh petugas penerimaan. Setelah itu calon klien mengisi berkas administrasi untuk dicocokkan dengan persyaratan sebagai berikut:

Persyaratan Calon Penerima Manfaat

1. Korban Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas lainnya bagi calon penerima manfaat sebanyak 2 rangkap.
3. Fotokopi Kartu keluarga (KK) calon penerima manfaat.
4. Jika calon penerima manfaat tidak diantar orang tua atau suami/istri, maka wali atau pihak perujuk memberikan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya sebanyak 2 rangkap dan surat kuasa bermaterai secukupnya.
5. Fotokopi BPJS/asuransi lainnya apabila ada, sebanyak 2 rangkap.
6. Materai senilai Rp. 10,000,- sebanyak 2 lembar untuk kepentingan jika calon penerima manfaat memenuhi syarat mendapatkan pelayanan: surat perjanjian dan surat pernyataan orang tua/wali.
7. Menyertakan hasil SWAB Antigen dengan masa lalutuasra 3 hari (calon penerima manfaat dan keluarganya/walinya).
8. Calon penerima manfaat tidak mendenita ganggua puikin gangguan jiwa (dual diagnosis) atau tidak sedang menjalani

terapi psikiatri.

9. Bagi calon penerima manfaat yang terdiagnosis HIV wajib melampirkan hasil CD4 terakhir, dengan jumlah minimal 200 dan sedang menjalani treatment antiretroviral (ARV).
10. Tidak memiliki penyakit menular seperti Tuberkulosis (TBC), Hepatitis B dan C, dan Covid-19.

Kelengkapan Pribadi Penerimaan Manfaat

1. Kemeja 3
 2. Kausi T shirt Oblong 3
 3. Kaus Berkerah 2
 4. Celana Panjang 2
 5. Celana Pendel 2
 6. Celana dan Kaus Dalam 4
 7. Handuk 1
 8. Sarung 2
 9. Baju Koko 2
 10. Sajadah 1
4. Penerimaan. Kemudian penerimaan menghubungi perawat untuk melakukan test urine untuk mendeteksi apakah klien korban NAPZA dan jenis NAPZA apa yang digunakan oleh klien, kemudian memberikan screening untuk mendeteksi jenis penyalahgunaan zat apa yang dikonsumsi dan risiko penggunaannya apakah tinggi, sedang, atau ringan dan hasilnya dicocokkan dengan hasil test urine.
 5. Kesepakatan Awal, pada tahap ini memberikan kontrak layanan yang isinya berkaitan dengan kesepakatan antara lembaga dengan pihak klien melalui *inform consent* ataupun persetujuan orang tua/keluarganya dengan pernyataan-pernyataan tentang hak dan kewajiban yang ditandatangani kedua belah pihak.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Pelaksanaan Pemberdayaan Melalui Program Vokasional Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi

Dalam proses rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA yang ada di Sentra Galih Pakuan Bogor salah satunya yaitu dengan pemberdayaan. Dalam pelaksanaan pemberdayaan yaitu dengan memberikan program vokasional kepada para Penerima Manfaat. Menurut Edi Suharto (2014) Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas kehidupannya.

Sebagaimana yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bu Fenny selaku pekerja sosial, yang mengatakan bahwa:

“Pemberdayaan pada program vokasional di Sentra itu ya serangkaian kegiatan untuk mendapatkan keahlian atau keterampilan bagi penerima manfaat. Jadi yang sebelumnya Penerima Manfaat itu terlibat di lingkungan yang pemakai NAPZA dan dia juga tidak punya keahlian, tidak punya kegiatan, mau cari kerja susah. Disini kita kasih vokasional itu, dan walaupun misalkan PM sebelumnya tidak pernah tau tentang perbengkelan atau apa, tetapi dia masuk vokasionalnya, itu merupakan point plusnya yang tadinya dia tiak bisa, menjadi bisa dan nambah skill dia. Padahal mungkin dia sebenarnya secara keahliannya bukan disitu, tapi ya gapapa untuk menambahkan skillnya.” (wawancara 6 Juni 2023)

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Pak Mulyana selaku pekerja sosial, yang mengatakan:

“Program vokasional disini merupakan salah satu pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi penerima manfaat. Program vokasional itu memberi bekal keterampilan yang mungkin nanti bisa dimanfaatkan setelah PM terminasi disini. Keterampilan yang dia dapatkan disini menjadi bekal untuk nanti dia bekerja atau berwirausaha.” (wawancara 5 Juni 2023)

Beliau juga menambahkan:

“Tujuan diberikannya pemberdayaan pada program vokasional itu agar PM dapat tahu keterampilan yang mereka miliki. Nantinya vokasional yang dia ikuti itu akan bermanfaat setelah program rehabilitasi selesai. Jadi sudah persiapan untuk bekal mereka, bilamana mereka sudah terminasi disini. Siapa tau mereka dengan vokasional disini dapat dikembangkan di tempat tinggalnya masing-masing untuk bekerja atau berwirausaha.” (wawancara 5 Juni 2023)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan hasil dari pengumpulan data dan fakta yang ada di lapangan. Dalam pengumpulan data dan fakta tersebut, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa informan, karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana pengumpulan data dan fakta menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

4.2.1.1 Proses dan Tahapan Pemberdayaan Program Vokasional

Isbandi Rukminto Adi (2008), menguraikan bahwa tahapan pemberdayaan terdiri dari tujuh tahapan, yakni dari tahap persiapan sampai dengan tahap terminasi. Pada tahap awal, yaitu persiapan SDM yakni instruktur dan sarana prasarana. Tahap kedua, mengidentifikasi klien. Tahap ketiga, berkaitan dengan keterlibatan Penerima Manfaat dalam perencanaan alternatif program. Tahap keempat, memformulasikan gagasan klien. Tahap kelima, fokusnya adalah pada

pelaksanaan program. Tahap keenam, berkaitan dengan proses pengawasan terhadap program yang dilaksanakan. Tahap ketujuh, pemutusan hubungan atau kontrak.

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan ini, adanya penyiapan instruktur dan penerima manfaat. Persiapan instruktur dimaksudkan untuk menyesuaikan bidang yang dibutuhkan. Sedangkan penyiapan lapangan dimaksudkan untuk melakukan kelayakan atau ketersediaan terhadap sarana dan prasarana.

Sebagaimana yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Pak Mulyana selaku pekerja sosial. Beliau menyatakan bahwa:

“Pada tahapan persiapan yang terlibat itu ada pekerja sosial, instruktur, dan penerima manfaat. Untuk alur pelayanan program vokasional, penerima manfaat diberi tahu program vokasional itu setelah dua minggu di rehabilitasi. Di program vokasional itu pekerja sosial berperan sebagai pendamping. SDMnya disini ada, seperti untuk instruktur itu ada open recruitment, untuk instruktur itu perispannya dilakukan oleh TU. Kalau untuk kriteria instruktur itu yang penting dia ahli dibidang vokasional ini saja. Sedangkan kalau untuk pembekalan instruktur itu tidak ada, tetapi ada assessmen untuk mengetahui sejauh mana keterampilan yang dimilikinya. Untuk sekarang ini penerima manfaat pada tahap primary sudah bisa mengikuti vokasional karena penerima manfaat disini itu jumlahnya sedikit, biasanya itu pada tahap re-entry penerima manfaat diberikan keterampilan atau vokasional. Jadi dalam program vokasional PM hanya tinggal mengikuti program vokasional saja yang sesuai dengan hasil assessmen mereka. Untuk tahap ini SOP dari Sentra itu kita belum ada. Jadi sebetulnya SOP itu menyatunya dengan jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan dan SOP itu baru ingin dibicarakan lagi, karena yang lama sudah tidak berlaku. Lalu untuk sarana dan prasarana tidak ada persiapan

tersendiri ya, karena disini sudah tersedia, namun kalau modul dari Sentra itu tidak ada. Jadi modul itu tergantung dari instruktur vokasionalnya, karenakan vokasional beda-beda ya, jadi itu dibuat oleh instruktur.” (wawancara 5 Juni 2023)

Beliau juga menambahkan:

“... program vokasional yang ada di Galih Pakuan itu ada lima. Ada sablon atau desain, otomotif atau roda tiga, lalu ada perikanan, pertanian, sama keset.” (wawancara 5 Juni 2023)

Dalam kriteria instruktur vokasional tidak ada kriteria khususnya, namun sudah harus sesuai bidang yang sesuai di Sentra Galih Pakuan Bogor. Selain itu, untuk sarana dan prasarana tidak ada persiapan, karena sudah ada dari awal. Dimana pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan dari Ibu Fenny selaku pekerja sosial, yang mengatakan:

“... untuk kriteria instruktur vokasional itu ada, namun tidak ada kriteria khususnya. Jadi yang pasti dia harus sudah familiar dan sudah bisa untuk sesuai bidang disini yang dibutuhkan. Untuk tahap persiapan pada sarana prasarana tidak ada persiapan sih, karenakan kita udah ada ya. Udah ada disini, SDMnya juga ada.” (wawancara 6 Juni 2023)

Dalam hal ini Penerima Manfaat pada program vokasional hanya mengikuti program yang sudah sesuai dengan minatnya yang dilihat pada hasil assessmen. Beliau juga menambahkan:

“Jadi ya semuanya sudah ada, kalau PM itu tinggal ikutin saja. Sesuai hasil assessmentnya PM misalkan minat ke vokasional A, yaudah dia tinggal ikutin. Paling kalo misalkan ada bahan vokasional yang habis, baru instruktur yang ajukan ke kantor. Lalu untuk modul dari Sentra itu tidak ada, untuk modul bisa ditanyakan kepada instruktur.” (wawancara 6 Juni 2023)

Dimana pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan dari Pak Idham selaku instruktur, yang mengatakan:

“Modul itu balik lagi ke kurikulum yang saya buat, kalau modul dari Sentra itu saya belum menerima. Kalau dari kurikulum itu saya membaginya ada dua yaitu teori dan praktek. Materinya itu saya bikin desain dasar, industri kreatif, branding, bisnis plan, pengenalan sablon, jenis sablon, dan teknik sablon. Sedangkan kalau untuk prakteknya itu ada art therapy, sablon manual dan kalau yang digital itu print dtf.” (wawancara 5 Juni 2023)

2. Tahap Assessmen

Pada tahap ini mengidentifikasi Penerima Manfaat yang dimiliki oleh mereka sebagai sasaran pemberdayaan. Dalam tahapan ini mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki oleh Penerima Manfaat sebagai sasaran pemberdayaan.

Sebagaimana yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Pak Mulyana selaku pekerja sosial. Beliau menyatakan bahwa:

“Pada tahap ini masuknya ke assessmen pada program vokasional PM itu dengan wawancara, bisa dilihat dari hasil assessmen awal dia bagaimana. Untuk assessmen awal itu seperti mengidentifikasi masalah, dilihat juga KPN itu kecanduannya sudah ditahap apa. Sedangkan untuk assessmen lanjutan itu dilihat dari perubahan perilakunya, kesehatannya, lalu dilihat juga minat bakat dia. Untuk kriterianya penerima manfaat di program vokasional itu tidak ada, tetapi dilihatnya ke hasil assessmen lanjutan penerima manfaat itu dia minat dan bakatnya kemana. Penerima manfaat diberi tahu program vokasional itu setelah dua minggu di rehabilitasi.” (wawancara 5 Juni 2023)

Beliau juga menambahkan:

“Jangka waktu assessmen awal ke assessmen lanjutan itu setelah dua minggu. Biasanya setelah dua minggu itu penerima manfaat

sudah masuk ke program, karenakan selama dari assessmen awal itu penerima manfaat belum masuk program, karena masih penyesuaian disini ya. Setelah itu baru di assessmen lagi, kalau memang hasil assessmennya sudah bisa masuk program, baru penerima ikut program yang ada. Program vokasional dilihat dari hasil assessmen lanjutan, disitu dapat dilihat bagaimana minat dia pada program vokasional untuk keterampilan itu.yang akan mereka jalani.” (wawancara 5 Juni 2023)

Pada hasil assessmen lanjutan dilihat bagaimana minat Penerima Manfaat pada program vokasional yang akan dijalani. Senada dengan penuturan yang disampaikan oleh Ibu Fenny selaku pekerja sosial. Berikut pernyataan yang diberikan:

“... Jadi assessmen lanjutan itu kita melalui progressnya PM disini. Jadi progress yang dinilai itu, bagaimana si PM dengan kegiatan disini. Jadi kalau misalkan assessmen lanjutannya dari entry unit ke primary, PM sudah melihat-lihat kalau disini ada program vokasional apa saja. Ternyata dia minatnya ke vokasional A, yaudah itu yang kita jadikan patokan hasil assessmen itu agar dia ikut vokasional.” (wawancara 6 Juni 2023)

Dimana pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan dari Pak Idham selaku instruktur, yang mengatakan:

“Untuk tahap assessmen itu dari pekerja sosialnya ya, sedangkan kalau saya sebagai instruktur untuk mengedukasi PM terjun langsung ke vokasionalnya. Untuk itu disini saya mengajarkan mereka desain basicnya, dari situ saya bisa lihat kreatifitas mereka sebenarnya bagaimana.” (wawancara 5 Juni 2023)

3. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Tahap selanjutnya setelah tahap assessmen adalah tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan, Pada tahap ini

pekerja sosial secara partisipatif mencoba melibatkan penerima manfaat yang mana diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dilakukan.

Seperti yang dikatakan oleh Pak Mulyana selaku pekerja sosial dalam sesi wawancara, yang mengatakan:

“Pada perencanaan alternatif itu sendiri pasti ada keterlibatan PM, dikarenakan untuk dia juga. Dilihat dari minatnya dia kemana, dilihat juga dari hasil assessmennya. Kalau memang hasil assessmennya dia ingin berjualan, akan kami bantu. Tetapi ya balik lagi dilihat lagi bagaimana hasil assessmennya.” (wawancara 5 Juni 2023)

Dalam hal ini diberikannya bantuan kepada Penerima Manfaat pada tahap perencanaan alternatif. Untuk modal bantuan, hanya diberikan bantuan sekali. Namun untuk mengelola dan pembukuan pada alternatif program itu dilakukannya sendiri. Senada dengan penuturan yang disampaikan oleh Ibu Fenny selaku pekerja sosial. Berikut pernyataan yang diberikan:

“... jadi kita kasih bantuan, lalu hasil dan lain-lainnya dikelola sama dia sendiri. Jadi kalo kita hanya bantuan sekali saja, tapi yang mengelolanya dan pembukuan yang lain-lain itu dia sendiri. Jadi kita hanya menerima laporan saja setiap bulan.” (wawancara 6 Juni 2023)

Pada perencanaan alternatif adanya keterlibatan Penerima Manfaat. Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan dari Saudara AH selaku ex-penerima manfaat, yang mengatakan:

“Untuk perencanaan alternatif program itu ada keterlibatan PM ya, seperti saat saya di rehab. Saya itu awalnya mengambil vokasional ikan, yang sudah saya ceritakan tadi. Lalu saya juga belajar berwirausaha dari teman saya yang saat itu masih jadi penerima manfaat. Setelah PM itu pulang, jadi saya menggantikan.

Disitu saya juga diassessmen apakah benar-benar berminat disana atau tidak. Dengan hasil assessmen saya itu maka saya bisa berwirausaha sekarang.” (wawancara 9 Juni 2023)

4. Tahap Formulasi Rencana Aksi

Dalam tahap ini pekerja sosial membantu penerima manfaat untuk memformulasikan gagasan mereka dalam bentuk tulisan dan anggaran bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal yang akan ditunjukkan ke pihak Sentra.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Fenny selaku pekerja sosial dalam sesi wawancara, yang mengatakan:

“Jadi ya dia yang bikin kebutuhannya sendiri apa saja, misalkan kompor atau apa dan dia mau dagang apa. Jadi intinya mereka merincikan sendiri apa yang dibutuhkan untuk usaha. Nantinya pekerja sosial akan membantu dalam pembuatan proposal yang akan diajukan ke Sentra. Jadi pada tahap ini mereka tidak kasih modal uang, tetapi dikasihnya modal usaha yang sudah berupa barang sama bahan.” (wawancara 6 Juni 2023)

Pada tahap ini adanya keterlibatan Penerima Manfaat dalam hal merincikan apa saja yang dibutuhkan. Dilihat juga dari kemampuan Penerima Manfaat itu sejauh mana. Beliau juga menambahkan:

“... tahap ini pasti ada keterlibatan PM itu sendiri, dikarenakan kita ga mungkin ngajuin kalau misalkan PMnya ga taukan kalau mau usaha apa. Terus sesuai yang kemampuan dia juga bagaimana. Jadi mereka mengusung sendiri rincian biaya yang akan diajukan.” (wawancara 6 Juni 2023)

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan dari Pak Mulyana selaku pekerja sosial, yang mengatakan:

“Pada tahap ini itu bagi mereka yang minat, tentu harus

mengusung sendiri biayanya, lalu diajukan ke kantor ya. Dari kantor juga tidak langsung menyetujui, dilihat dulu benar tidak minatnya kesitu atau jangan-jangan hanya sebentar lalu langsung berhenti. Maka ada assessmen dulu untuk rencana aksi tersebut. Kalau memang hasil assessmennya ternyata ada minat yang besar disitu, maka akan ajukan proposal sesuai apa yang PM itu butuhkan.” (wawancara 5 Juni 2023)

Hal ini juga didukung oleh Saudara AH selaku ex-penerima manfaat mengenai formulasi rencana aksi tersebut, informan dalam sesi wawancara yang mengatakan:

“Untuk tahap ini tuh saya terlibat, karena dari saya itu merincikan sendiri apa yang saya butuhkan untuk memulai vokasional saya. Jadi dalam hal modal usaha itu ya saya merincikan kebutuhan apa saja yang diperlukan. Kalau saya sudah merincikan kebutuhan itu, nanti pekerja sosial membantu untuk membuat proposal dan akan berikan ke kantor, dan alhamdulillah dari biaya atau proposallah ya, yang saya ajukan itu disetujui oleh pihak kantor. Jadi kegiatan saya sekarang jualan JASUKE dari hasil modal usaha itu.” (wawancara 9 Juni 2023)

5. Tahap Pelaksanaan

Setelah beberapa tahap dilakukan, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan program atau kegiatan yang berjalan. Dalam pelaksanaan pemberdayaan program vokasional ini memerlukan kerja sama dari instruktur dan penerima manfaat, karena instruktur yang terjun langsung membimbing Penerima Manfaat pada program vokasional. Pada pelaksanaan vokasional ini dapat menambah pengetahuan dan keterampilan untuk Penerima Manfaat, dari keterampilan itu dapat menjadi bekal untuk bekerja atau berwirausaha oleh Penerima Manfaat.

Seperti yang dikatakan oleh Pak Mulyana selaku pekerja sosial dalam sesi wawancara, yang mengatakan:

“Sebelumnya untuk waktu rehabilitasi penerima manfaat itu dilaksanakannya sampai 6 bulan, jadi selama 6 bulan juga penerima manfaat mengikuti program. Dalam pelaksanaan vokasional ini semuanya ada kerja sama dan berbagi peran, yang terlibat dalam vokasional itu ada pekerja sosial yang berperan sebagai pendampingan, untuk pendampingan itu kalau misalkan ada bahan yang kurang atau ada yang dibutuhkan itu diberi tahu dari instruktur ke peksos. Lalu ada instruktur yang berperan sebagai edukator atau mengedukasi PM dalam pelaksanaan vokasional, dan penerima manfaat yang ikut serta menjalani program. Untuk waktu pelaksanaan vokasional itu dimulai dari hari Senin sampai Jumat. Jadi disatukan dengan jadwal di asrama, vokasional itu dilaksanakan dari jam 10.00 pagi sampai jam 12.00 siang. Pada vokasional ini pelaksanaannya suka tidak tepat waktu, tetapi itu sih tergantung orangnya ya, seperti di beberapa vokasional itu kan ada saja ngaretnya. Ya dari pelaksanaan vokasional itu terutama untuk menambah pengetahuan dan skill, dilihat dari minat mereka yang bisa dikembangkan. Jadi dengan dia punya keterampilan itu bisa untuk dia memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang dia punya. Namun, untuk pretest dan post test di program vokasional itu tidak ada.”
(wawancara 5 Juni 2023)

Pada tahap ini, adanya keterlibatan dan peran pekerja sosial, instruktur, dan penerima manfaat itu menjadi poin penting. Perlunya menjalin kerja sama dengan penerima manfaat, karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan bisa saja keluar dari apa yang sudah direncanakan di awal. Senada dengan penuturan yang disampaikan oleh Ibu Fenny selaku pekerja sosial. Berikut pernyataan yang diberikan:

“... pada tahap ini itu peran pekerja sosial, instruktur, dan penerima manfaat sangat dibutuhkan. Karenakan untuk menjalin kerja sama pada pelaksanaan program vokasional tersebut. sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerja sama antara pekerja sosial, instruktur, ataupun dari Penerima Manfaat.” (wawancara 6 Juni 2023)

Beliau juga menambahkan:

“Pada pelaksanaan ini yang pastikan dia nanti sudah punya skill ya, ketika dia keluar rehabilitasi. Ya kalau misalkan memang dia mau ajuin untuk usaha, boleh. Tetapi biasanya ada juga orang tua-orang tua yang memang mampu, dan biasanya kita memberikan informasi dan motivasi sama orang tua, kalau misalkan si PM itu selama disini ikut vokasional apa dan sekarang dia sudah bisa apa saja. Jadi maksudnya kita motivasi untuk bisa kalau mau dicoba, misalkan buka usaha sendiri atau misalkan dia mencari kerja yang sesuai dengan skillnya dia punya. Selain itu vokasional sebenarnya pendidikan juga, tapi kan berbeda karena itu kita langsung praktek. Jadi maksudnya efektif buat biar ga teori mulu, karekan kalo program itu sama kaya kita kuliahkan teori mulu. Tapi tetap, dalam pelaksanaannya itu diajarkan ada materi dan prakteknya bagaimana.” (wawancara 6 Juni 2023)

Hal ini juga didukung oleh Pak Idham selaku instruktur mengenai pelaksanaan program vokasional, informan dalam sesi wawancara yang mengatakan:

“... ditahap ini itu saya bagi dua ada materi dan praktik. Materinya itu saya bikin desain dasar, industri kreatif, branding, bisnis plan, industry kreatif, pengenalan sablon, jenis sablon, dan teknik sablon. Sedangkan kalau untuk prakteknya itu ada art therapy (gambar dasar, bisa dilihat dari garis-garis yang mereka

buat), sablon manual dan kalau yang digital itu print dtf. Lalu ada tata tertib begitu masuk kelas ada piket dulu sesuai jadwal yang piket siapa, lalu kita berdoa dulu. Setelah piket baru kita memulai kelas materinya. Kadang kalau memang sedang membahas logo dan branding, biasanya PM saya suruh membuat logo. Pada industri kreatif itu banyak sekali kesempatan, khususnya bagi anak-anak NAPZA. Jadi saya saat ini ingin mengenalkan mereka saja dulu peluang-peluang yang ada diindustri kreatif saat ini.” (wawancara 5 Juni 2023)

6. Tahap Evaluasi

Dilakukannya proses pengawasan adalah suatu hal yang harus dijalankan, karena evaluasi merupakan proses pengawasan yang bersangkutan terhadap program pemberdayaan yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh Pak Mulyana selaku pekerja sosial, beliau menyatakan bahwa:

“Evaluasi disini itu sebuah proses pengawasan yang dilakukan oleh pekerja sosial, instruktur dan juga melibatkan penerima manfaat ya. Evaluasi dilaksanakan sesuai kebutuhan saja, karena ada yang namanya rutin setiap bulan atau setiap minggu tetapi tergantung dari pekerja sosialnya. Kitakan evaluasi bisa dilaksanakan waktu CC. CC itu dilaksanakan kalau ada yang pindah dari primary ke re-entry, lalu untuk vokasional di CCkan juga, dan saat ingin terminasi. Kalau untuk NAPZA itu evaluasinya ada mingguan dan bulanan. Untuk evaluasi mingguan dan bulanan itu sama saja.” (wawancara 5 Juni 2023)

Beliau juga menambahkan:

“Kalau dulu itu setiap bulannya ada evaluasi, karena mereka dituntut untuk memberikan laporan setiap bulannya. Untuk evaluasi bulan itu ada, tetapi kalau secara program vokasional

saja itu tidak. Kalau secara umum program ada evaluasi bulanan, kalau evaluasi pada program vokasional itu tergantung kebutuhan saja. Artinya mereka laporan setiap bulan ada, cuma apa itu berbentuk perkembangan atau apa kurang tahu ya. Cuma sampai saat ini saya sendiri sebagai pendamping belum pernah terima laporan vokasional itu.” (wawancara 5 Juni 2023)

Dalam hal ini, evaluasi pada program vokasional tidak diberlakukan secara rutin. Jadi hanya menyesuaikan kebutuhan evaluasi pada program saja. Pada evaluasi itu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pekerja sosial. Pernyataan ini didukung dengan hasil wawancara yang diperoleh dari Ibu Fenny selaku pekerja sosial, yaitu:

“Evaluasinya sebenarnya bagaimana pekerja sosial sih ya dan untuk program vokasional itu ga dilaksanain secara rutin. Untuk evaluasi program itu dilaksanain kalo ada kebutuhan aja. Kadang-kadang ada pekerja sosial yang evaluasi sebulan sekali, terus evaluasi secara keseluruhan. Jadi itu balik lagi ke kebutuhan pekerja sosialnya. Jadi beda-beda karenakan pekerja sosial itu dia nanganin klinis ya, jadi langsung nanganin orangnya. Jadi ketika dia mau assessmen lanjutan, ya itulah dia sambil evaluasi program dan vokasionalnya juga. Tetapi tidak semua pekerja sosial sebulan sekali, ada juga yang mungkin seminggu sekali atau dua bulan sekali. Jadi balik lagi gimana pekerja sosial untuk evaluasinya.” (wawancara 6 Juni 2023)

7. Tahap Terminasi

Tahap terakhir dalam proses pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Isbandi (2003) adalah tahap terminasi, dimana pelaksana program memutuskan hubungan kepada penerima manfaat, ketika telah selesainya pelaksanaan program tersebut dan sudah memberikan dampak serta terciptanya

kemandirian. Dalam pelaksanaan program vokasional, pekerja sosial sebagai pelaksana program melakukan pemutusan hubungan ketika penerima manfaat sudah ada perubahan perilaku, tetapi seiring habisnya waktu rehabilitasi sosial maka tindakan selanjutnya terminasi, tentu hal ini berhentinya juga program vokasional. Pada proses pelepasan tersebut dimulai setelah adanya perubahan perilaku dalam diri penerima manfaat, seperti halnya penerima manfaat sudah mandiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Pak Mulyana selaku pekerja sosial beliau menyatakan bahwa:

“Pada tahap terminasi ini merupakan pemutusan hubungan dengan penerima manfaat ya. Program vokasional bukan yang pokok, karena dalam rehabilitasi sosial adalah diutamakan perubahan perilaku, sementara program vokasional hanya memberi bekal keterampilan yang mungkin nanti bisa dimanfaatkan. Sedangkan kalau untuk test vokasional saat dia ingin terminasi itu tidak ada. Adanya itu nanti saat CC, dilihat penerima manfaat itu pekungannya sudah sejauh apa, karena di CC itu instruktur nya juga hadir. Di CC itulah kita tahu perkembangan penerima manfaat, baik dari segi perilaku, kesehatan, dan keterampilannya Dengan demikian tidak ada terminasi pada program vokasional, tetapi seiring habisnya waktu rehabilitasi sosial maka tindakan selanjutnya terminasi, tentu hal ini berhentinya juga program vokasional.” (wawancara 5 Juni 2023)

Terminasi dilakukannya jika penerima manfaat sudah bisa mandiri. Pada saat terminasi ini penerima manfaat mendapatkan modal bantuan usaha yang sesuai dengan keterampilannya dari pihak Sentra. Namun, pihak sentra harus melakukan observasi terlebih dahulu pada saat ingin memberikan modal usaha tersebut. Beliau juga menambahkan:

“... terminasi ini dilakukan kalau penerima manfaat sudah bisa mandiri. Pasca rehabilitasi PM bisa mendapatkan modal usaha dari Sentra, tetapi itu yang memang sesuai dengan kemampuan atau skillnya mereka. Jadi dari modal usaha itu dilihat dari minat dan bakat mereka. Dari pihak sini itu kita tidak langsung memberikan modal usaha, karena kita harus observasi terlebih dahulu lokasinya dimana, lalu kira-kira situasi dan kondisinya memungkinkan atau tidak dia buka usaha disitu.” (wawancara 5 Juni 2023)

Pernyataan tersebut didukung dengan hasil wawancara oleh Ibu Fenny selaku pekerja sosial, yaitu:

“Untuk terminasi pada penerima manfaat itu kita lihat indikator-indikator yang ada pada penerima manfaat. Yang diberikan pasca rehabilitasi itu bisa diberikan bantuan, bantuannya itu seperti modal dia untuk usaha. Lalu biasanya itu ada yang terminasi, setelah itu lanjut atau tetap ikut buat perakitan motor roda tiga yang untuk disabilitas itu. Tapi ada yang pulang, yaudah pulang aja, ada juga yang kaya gitu.” (wawancara 6 Juni 2023)

Senada dengan penuturan yang disampaikan oleh Pak Idham selaku instruktur. Berikut pernyataan yang diberikan:

“Kalau keberlanjutan programkan itu dikembalikan ke mereka ya, dikarenakan mungkin ketika mereka sudah memulainya sebenarnya tergantung dari diri mereka sendiri lagi ya. Seperti bagaimana mereka menjalankannya, bagaimana hubungan sosial mereka diluar apakah mereka bisa konsisten atau bisa komitmen, seperti itu.” (wawancara 5 Juni 2023)

Selain itu, hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa dalam tahapan pemberdayaan pada program vokasional yang dilakukan melibatkan pekerja sosial instruktur, dan penerima manfaat. Dalam hal ini diberikannya pemberdayaan

pada program vokasional agar penerima manfaat mengetahui keterampilan dan dapat mengembangkan keterampilannya. Dengan mereka memiliki keterampilan, hal itu akan menjadi bekal untuk bekerja dan berwirausaha setelah selesainya rehabilitasi.

Berdasarkan teknik triangulasi dengan melihat hasil wawancara, observasi, dan juga teori Isbandi Rukminto Adi (2008), dapat disimpulkan bahwa tahapan pemberdayaan pada program vokasional yang dilakukan oleh pihak Sentra Galih Pakuan Bogor dilaksanakan mulai dari tahap persiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana, penerima manfaat masuk untuk menjalankan program vokasional sejak penerima manfaat sudah ditahap primary. Selanjutnya dilakukannya tahap assessmen, tahap perencanaan alternatif program dan kegiatan, tahap formulasi rencana aksi, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap terminasi yang dimana pemutusan hubungan dengan penerima manfaat.

4.2.1.2 Tolak Ukur Kemandirian Ekonomi

Menurut hasil dari temuan di lapangan yang dilakukan oleh peneliti, menyatakan bahwa tolak ukur kemandirian ekonomi yang dihasilkan dari pelaksanaan ini ada lima. Sesuai dengan teori Priambodo dalam (Djazimah, 2004), mengutarakan bahwa kemandirian ekonomi secara konseptual mempunyai tolak ukur, yakni sebagai berikut:

1. Kemandirian ekonomi seseorang dapat dilihat dari adanya usaha yang dilakukan secara bijaksana. Maksudnya adalah usaha tersebut menghasilkan nilai dan keuntungan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Ibu Fenny selaku pekerja sosial beliau menyatakan bahwa:

“Dalam melakukan apa saja sebenarnya harus dilakukan secara bijaksana ya, apa lagi ini dalam hal mandiri secara ekonomi. Dengan adanya usaha itu ya bisa menghasilkan keuntungan dan

nilai tersendiri buat mereka.” (wawancara 6 Juni 2023)

Pernyataan tersebut didukung dengan hasil wawancara oleh Pak Mulyana selaku pekerja sosial, yaitu:

“Ya dari usaha itu dilakukannya harus secara bijaksana. Kalau dalam hal ini paling dilihat dari peningkatan kemampuannya disini. Kalau keberhasilannya disini karena mereka masih jadi residen tidak bisa dilihat, kecuali ia mengikuti vokasional yang memang menghasilkan uang. Karena kalau dilihat dari keberhasilannya itu mereka setelah terminasi. Apakah mereka bisa mengembangkan kemampuan mereka, sehingga dapat meningkatkan kemandirian ekonomi mereka atau tidak. Tetapi dari ex-PM kita itu udah ada yang mandiri secara ekonomi, misalnya ada yang udah berwirausaha ada juga yang udah bekerja sesuai dengan keahlian yang dia dapatkan disini sehingga bisa mandiri secara ekonomi. Dari kemandirian ekonomi ini dapat menghasilkan nilai dan keuntungan untuk mereka sendiri.” (wawancara 5 Juni 2023)

Kemandirian ekonomi dapat dilihat adanya usaha yang dilakukan seseorang baik dengan bekerja dan berwirausaha. Dalam suatu usaha yang dijalani dengan bijaksana akan ada nilai dan keuntungan sendiri untuk orang yang melakukannya. Saudara AP selaku Ex-Penerima Manfaat juga menambahkan:

“Mandiri secara ekonomi itu ya dengan bekerja atau berwirausaha ya. Seperti saya, sayakan kerja untuk kemandirian ekonomi saya, agar tidak bergantung dengan orang lain. Saya bekerja itu merupakan salah satu usaha saya untuk bangkit, terutama dalam hal ekonomi ya. Usaha itu saya tidak sia-siakan, dalam usaha untuk meningkatkan kemandirian ekonomi saya itu pasti ada nilai atau keuntungan sendiri buat saya. Saya tahu kalau mendapatkan pekerjaan itu susah, jadi saya lebih bijaksana dalam menghadapi

segala hal, seperti kemandirian ekonomi itu ya.” (wawancara 21 Juni 2023)

Senada dengan penuturan yang disampaikan oleh Pak Idham selaku instruktur. Berikut pernyataan yang diberikan:

“Iya, disini makanya saya juga mengajarkan mereka untuk mandiri, saya juga mereka untuk menjadi pribadi yang kreatif. Kalau sudah kreatif, insyaAllah nanti kalau mereka sudah di lapangan bisa mengatasinya. Dengan dia berusaha dalam hal kegiatan ekonomi, seperti berwirausaha pasti itu bisa meningkatkan value dan keuntungan mereka. Tetapi balik lagi kemerekanya gaimana, soalnya yang menjalankankan mereka semua ya. Ya dengan mereka berwirausaha dan tahu untung ruginya mereka berjualan, ya itu harus disikapi dengan bijaksana. Dengan mereka kemandirian ekonomi dilihat dari usahanya yang mereka lalukan secara bijaksana itulah yang akan menghasilkan nilai dan keuntungan bagi mereka sendiri, sehingga bisa saja mereka tidak bergantung lagi pada orang lain.” (wawancara 5 Juni 2023)

2. Kemandirian muncul dari kepercayaan diri seseorang dalam melakukan kegiatan ekonomi seperti berdagang, membuka usaha rumahan, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Pak Mulyana selaku pekerja sosial beliau menyatakan bahwa:

“Iya dalam hal ini kepercayaan diri itukan hal penting, kalau ga percaya diri itu seperti kita masih ragu-ragu yang mengakibatkan kitanya ga jadi untuk bekerja atau berwirausaha. Dengan mereka bisa mandiri secara ekonomi, itu bisa memunculkan kepercayaan diri mereka. Tetapi dilihat juga dari ketekunan PM tersebut, dari ketekunan diakan bisa dapat menumbuhkan kemandirian ekonomi pada diri dia. Ya artinya mereka itu diberikan kepercayaan dengan

modal sekian, karena hal ini harus dikembangkan. Jadi bagaimana mereka dapat mengembangkannya menjadi lebih besar.” (wawancara 5 Juni 2023)

Dalam hal ini, kemandirian ekonomi sangat berpengaruh pada kepercayaan diri seseorang. Dengan adanya kesungguhan dalam diri, hal itu dapat membuat seseorang menjadi percaya diri untuk membuka usaha. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil wawancara oleh Ibu Fenny selaku pekerja sosial, yaitu:

“... ya dengan mandirinya mereka secara ekonomi, pasti sangat berpengaruh dengan kepercayaan dirinya. Jadi itu kalau yang berhasil ya, tapi setidaknya kalau pun tidak berhasil minimal dapat meningkatkan skill dia. Berbeda kalau misalkan dia sungguh-sungguh mau itu untuk masa depannya dia ya pasti ujung-ujungnya dia akan usaha sendiri dari hasil skillnya itu kan. Jadi ya pasti dapat menumbuhkan kemandirian ekonomi dia, gitu.” (wawancara 6 Juni 2023)

Senada dengan penuturan yang disampaikan oleh Saudara AH selaku Ex-Penerima Manfaat. Berikut pernyataan yang diberikan:

“... dengan saya dagang itu jadi ngebangkitin kepercayaan diri saya dalam hal ekonomi, jadi ya bisa beli keperluan saya sendiri. Setelah dapat hasil uang itu dibawa ke bank mandiri untuk membuat kartu. Jadi selain saya yang ada didepan itu juga diberikan kartu, untuk merangsang mereka semangat dalam berwirausaha.” (wawancara 9 Juni 2023)

3. Kemandirian ekonomi dapat dilihat dari kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam waktu yang lama sehingga dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut memiliki kekuatan untuk berhasil di bidang ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Pak Mulyana selaku pekerja sosial beliau menyatakan bahwa:

“Kalau untuk jangka waktu itu tidak bisa dijadikan patokan berhasil atau engganya ya. Misalkan jualannya sudah lama, tetapi jualannya masih satu produk saja. Namun ada juga yang berwirausahanya banyak gitu produknya, tetapi jalannya hanya sebenentar karena jualannya dikonsumsi untuk dirinya sendiri. Jadi dapat dikatakan berhasil itu kalau dia dapat menambah produknya dari hasil produk sebelumnya, sehingga memiliki kekuatan untuk bertahan dan ekonominya dapat dikatakan berhasil. Selain itu kalau untuk bekerja ya baru bisa dikatakan mandiri secara ekonomi kalau dia memang bekerjanya disuatu tempat, dengan penghasilan yang cukup untuk kebutuhannya dia dan hal lain. Hal itu merupakan salah satu kekuatan untuk dia berhasil dibidang ekonomi.” (wawancara 5 Juni 2023)

Dalam hal ini, jangka waktu tidak bisa dijadikan patokan dalam hal berhasil secara ekonomi. Senada dengan penuturan yang disampaikan oleh Ibu Fenny selaku pekerja sosial. Berikut pernyataan yang diberikan:

“Untuk jangka waktu yang lama atau engganya itu ga bisa dijadiin patokan dia berhasil mandiri secara ekonomi ya. Karenakan setiap orang beda-beda prosesnya, bisa saja dengan dia memiliki keterampilan yang mumpuni bisa menjadi kekuatan dalam bidang ekonominya. Dalam kegiatan ekonomi itu juga beda-beda ya, ada pemberdayaan seperti vokasional yang bisa buat mereka mandiri secara ekonomi, karena yang tadinya ga punya keahlian, menjadi punya.” (wawancara 6 Juni 2023)

Saudara AH selaku Ex-Penerima Manfaat menambahkan:

“... disini itu saya satu tahun pemulihan dan satu dagang saya satu tahun, ya kurang lebih saya disini itu sudah dua tahun. Satu tahun

saya pemulihan serta ngejalanin program yang ada disini dan satu tahun lagi saya dagang untuk menjaga pemulihan saya. Dengan berjalannya waktu saya sudah berjualan satu tahun itu, saya mungkin saat ini sudah cukup berhasil ya dengan keadaan ekonomi saya. Dikarenakan saya sudah ada pekerjaan, yaitu dengan dagang. Jadi saya bisa membeli kebutuhan saya sendiri, dengan hasil dagang saya.” (wawancara 9 Juni 2023)

Senada dengan penuturan yang disampaikan oleh Saudara AP selaku Ex-Penerima Manfaat. Berikut pernyataan yang diberikan: *“Saya setelah terminasi disini itu langsung kerja diluar kota. Saya kerja itu kontrak disana selama 6 bulan, setelah habis kontrak saya pulang ke Bogor. Lalu saya sempat kontak dengan konselor saya, dan saya dipanggil sama konselor buat kerja di Sentra, karekan saya sudah ada basic di las ya, untuk saat ini saya itu mengerjakan viar motor roda tiga. Disini itu saya sudah bekerja kurang lebih 3 bulan. Ya untuk sejauh ini, alhamdulillah saya sudah mandiri secara ekonomi kak.”* (wawancara 21 Juni 2023)

4. Kemandirian ekonomi dapat dilihat dari keberanian seseorang untuk senantiasa menerima resiko yang akan timbul dari segala kegiatan ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Pak Mulyana selaku pekerja sosial beliau menyatakan bahwa: *“Oh iya pasti dilihat semua itu, karena kalau seseorang yang kurang berani itukan mereka masih ragu-ragu. Namun dengan dia berani untuk menghadapi semuanya dan menerima resiko yang bisa saja timbul dari kegiatan dia bekerja atau berwirausaha, berarti sudah bagus. Karena tidak semua orang berani menerima resiko yang akan timbul itu. Dengan dia berani menerima resiko kedepannya, dapat dikatakan dia sudah mandiri secara ekonomi. Karenakan pasti dia sudah memikirkan dengan matang dalam hal*

kegiatan ekonomi dia.” (wawancara 5 Juni 2023)

Dalam hal ini, kegiatan pada bidang ekonomi pasti ada konsekuensinya, salah satunya resiko yang akan timbul pada kegiatan ekonomi tersebut. Dari kemandirian ekonomi tersebut dapat dilihatnya keberanian seseorang untuk menerima resiko yang akan timbul. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil wawancara oleh Pak Idham selaku instruktur, yaitu:

“Kalau untuk menerima resiko itu sudah konsekuensi mereka dari awal dengan kegiatan dibidang ekonominya ya, dikarenakan kalau bekerja atau berdagang itu tidak selalu berjalan mulus. Tetapi bisa dilihat juga dari minat, komitmen, dan ikhtiarnya mereka. Dengan mereka berani untuk menerima resiko yang mungkin akan timbul dalam kegiatan ekonomi itu merupakan salah satu kemandirian ekonomi. Dari kemandirian ekonomi itu dapat dilihat keberanian mereka menerima resiko kedepannya bagaimana.” (wawancara 5 Juni 2023)

Senada dengan penuturan yang disampaikan oleh Saudara AH selaku Ex-Penerima Manfaat. Berikut pernyataan yang diberikan:

“Kalau resiko itu sih pasti ada ya. Ya dengan saya berani berwirausaha dagang JASUKE inikan berarti saya sudah tau konsekuensinya, karena dagang itu pasti ada plus minusnya bisa saja jualan saya tidak habis, ataupun sebaliknya. Dengan saya dagang ini ya saya sudah nerima resiko yang akan timbul dari segi apapun, terutama dalam segi ekonomi ya. Dengan saya sudah tau resiko yang akan timbul itu, membuat saya percaya sama diri saya sendiri.” (wawancara 9 Juni 2023)

5. Kemandirian ekonomi dapat dilihat dari tindakan seseorang yang tidak terlibat dan bergantung dengan orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Ibu Fenny selaku pekerja sosial beliau menyatakan bahwa:

“Pasti, kemandirian ekonomi itu dilihat dari segala tindakan mereka yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Hal ini merupakan kemampuan dalam mengatur ekonomi. Dengan memiliki kemampuan ini maka mereka dapat mengendalikan kebutuhan ekonominya dan dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri, tanpa adanya bantuan dari orang lain.”
(wawancara 6 Juni 2023)

Pernyataan tersebut didukung dengan hasil wawancara oleh Pak Idham selaku instruktur, yaitu:

“Ya kemandirian ekonomi itu bisa dilihat dari tindakan dari seseorang itu sendiri sih ya. Salah satunya dengan tidak bergantung pada orang lain, dikarenakan ya PM itu masih suka bergantung ya. Tetapi bisa dilihat dengan skalanya, kalau misalkan si A sudah merasa cukup dengan skala itu, maka ya sudah bisa tidak bergantung dari orang lain. Jadi semua bisa dilihat dari skala kebutuhannya juga. Kalau untuk dalam hal ini itu penerima manfaat atau ex-penerima manfaat bisa mandiri ya dengan dia punya kerja atau berjualan gitu. Dengan dia punya penghasilan sendiri sih ya udah bisa dikatakan dia mandiri secara ekonomi, apa lagi dengan dia tidak bergantung kepada siapa-siapa.”
(wawancara 5 Juni 2023)

Saudara AP selaku Ex-Penerima Manfaat juga menambahkan:

“Alhamdulillah sih ya, untuk sekarang saya sudah mandiri secara ekonomi. Jadi tidak bergantung pada siapapun. Saat ini juga saya sudah memiliki pekerjaan, yaitu kerja disini membuat viar roda tiga dan pastinya digaji, jadi memiliki penghasilan sendiri. Setelah

saya sudah selesai bekerja disini, saya sudah memiliki plan untuk ke depannya ingin bekerja dimana.” (wawancara 5 Juni 2023)

Senada dengan penuturan yang disampaikan oleh Saudara AH selaku Ex-Penerima Manfaat. Berikut pernyataan yang diberikan: *“Dari satu tahun lalukan saya sudah berwirausaha ya, dengan berdagang JASUKE itu. Jadi saya sudah tidak bergantung dengan siapapun sekarang. Apa lagikan saya sudah tidak punya orang tua atau keluarga ya. Jadi saya bekerja untuk diri saya sendiri saja. Ya walaupun saya masih tinggal disini ya, tetapi secara ekonomi saya sudah bisa mandiri dengan hasil dagang saya itu.”* (wawancara 9 Juni 2023)

Selain itu, hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa tolak ukur kemandirian ekonomi dalam program vokasional yang diberikan oleh pihak Sentra Galih Pakuan Bogor adalah melihat perbandingan dalam kegiatan ekonomi. Kemandirian ekonomi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi penerima manfaat atau ex-penerima manfaat. Dalam hal ini, mandiri secara ekonomi itu untuk mensejahterakan diri dan sudah tidak bergantung dengan orang lain.

Berdasarkan teknik triangulasi dengan melihat hasil wawancara, observasi, serta teori Priambodo dalam (Djazimah, 2004) dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan pada korban penyalahgunaan napza melalui program vokasional dalam meningkatkan kemandirian ekonomi di Sentra Galih Pakuan Bogor memiliki tolak ukur kemandirian ekonomi. Tolak ukur kemandirian ekonomi seseorang dapat dilihat dari usaha yang dilakukan secara bijaksana, sehingga dapat menghasilkan nilai dan keuntungan. Dengan adanya kepercayaan diri pada seseorang, hal ini dapat melakukannya untuk berwirausaha dengan berdagang sesuai dengan keterampilan yang ia punyai. Namun dalam tolak ukur kemandirian, jangka waktu lama atau cepatnya suatu usaha dalam

kegiatan ekonomi tidak dapat ditentukan. Selain itu, kemandirian ekonomi seseorang dapat dilihat dari orang itu sudah tidak bergantung dengan orang lain. Hal ini merupakan salah satu kemandirian ekonomi, dikarenakan seseorang itu sudah memiliki penghasilan sendiri dan bisa memenuhi kebutuhannya.

4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Melalui Program Vokasional

Sebagai salah satu lembaga yang berfokus pada proses Rehabilitasi Sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA, Sentra Galih Pakuan dalam melaksanakan proses pelayanan program yang ada untuk penerima tidak selalu berjalan dengan lancar. Didalam pelaksanaannya, pasti terdapat faktor pendukung dan faktor penghambatan ataupun kendala pada saat proses pemberian program. Begitupun pada pelaksanaan Program Vokasional yang diberikan kepada penerima manfaat. Dimana terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang ada dalam pelaksanaannya.

Seperti yang dikatakan oleh Pak Mulyana selaku pekerja sosial dalam sesi wawancara, beliau mengatakan:

“Faktor pendukung itu salah satunya dapat dilihat dari sarana prasarana yang ada. Selain itu kalau ada pameran diluar atau di dalam Sentra kita biasanya ikut, dari hasil desain dan sablon baju kita jualan, ada juga dari hasil pertanian itu juga dijualin saat pameran. Pendukungnya juga dapat dilihat dari SDM yang ada di Sentra, seperti pekerja sosial, konselor, dan instruktur yang memotivasi PM. Sedangkan untuk faktor penghambatnya dapat dilihat dari PM, terkhususnya KPN itu jumlahnya sedikit sekali mungkin dikarenakan adanya kebijakan yang baru, sehingga kebijakannya ada yang berubah. Dulu itu sebelum ada kebijakan baru jumlah penerima manfaat sampai 150 orang, tetapi untuk sekarang jumlah penerima manfaat baru 20 orang saja, dan sebelumnya di Sentra hanya

menerima korban penyalahgunaan NAPZA diseluruh Indonesia, tetapi sekarang ini kebijakannya sudah berubah jadi hanya beberapa wilayah saja yang bisa menerima korban penyalahgunaan NAPZA dan sekarang lembaga sudah menjadi multi layanan. Jadi sekarang karena sudah multi layanan di Sentra itu ada disabilitas, ODGJ, lansia, korban penyalahgunaan NAPZA, dan yang lainnya. Lalu faktor penghambat lain dapat dilihat dari si PMnya ya, karena ada PM yang tertutup jadi membatasi diri dia sendiri dengan yang lain. Selain itu hambatan vokasiolnal untuk sarana dan prasarana ada alat yang tidak bisa dimanfaatkan, seperti alat sablon yang besar itukan disini tidak bisa dimanfaatkan, karena belum ada yang bisa mengoprasikannya. Kalau lengkap sih lengkap, tetapi yaitu ada yang masih kurang bisa dimanfaatkan.” (wawancara 5 Juni 2023)

Ibu Fenny selaku pekerja sosial juga menambahkan terkait faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program vokasional, beliau mengatakan:

“Untuk faktor pendukungnya itu dapat dilihat dari pekerja sosialnya, pendampingnya, diberikannya dukungan dan motivasi dia selama berada disini seperti apa. Lalu dilihat dari orang tuanya juga, hal itu juga merupakan salah satu faktor penting. Selain itu dapat dilihat juga sarana dan prasanara vokasinalnya yang sudah ada. Jadi mereka bisa dapat meningkatkan kemandirian ekonomini mereka dengan keahlian yang mereka dapatkan disini. Kalau untuk faktor penghambatnya dari diri dia sendiri. Biasanya kalau KPN itu sering banget dia membatasi diri dia sendiri, kaya belum sungguh-sungguh untuk berubah. Apa lagi orang-orang yang kesini itu gara-gara ketangkap polisi, beda sama orang-orang yang memang sudah cape memakai NAPZA. Itu akan beda progressnya sama orang yang tiba-tiba datang kesini karena ditangkap, karenakan bukan keinginan dia untuk rehab. Berbeda sama orang yang emang sudah cape, emang keluarganya udah minta direhab itu juga biasanya niatnya udah beda.

Selain itu setau saya itu disini pernah ada penyaluran untuk magang penerima manfaat sesuai keahliannya, tapi sekarang tidak ada MoU untuk magang penerima manfaat itu.” (wawancara 6 Juni 2023)

Pernyataan ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan Pak Idham selaku instruktur, yaitu:

“Untuk faktor pendukungnya itu bisa dari sarana dan prasarana yang ada disini, lalu juga dari si PMnya sendiri. Karenakan kasus PM ada yang berat, ada yang ringan. Dapat dilihat juga dari SDM yang ada disini, seperti pekerja sosial dan instruktur. Sedangkan untuk faktor penghambatnya itu ada alat yang memang belum tersedia untuk vokasional dan dari Sentra belum ada modul, jadi saya yang buat modul sendiri. Lalu pada pelaksanaan vokasional, terkadang itu penerima manfaat datang saat jam vokasional sudah mau habis, jadi mereka datang diakhiran. Kadang juga tidak ada yang datang vokasional sama sekali. Selain itu untuk perawatan alat tidak ada, karena tidak ada teknisi. Bahkan ada beberapa alat yang dari awal belum dipakai sama sekali, karena tidak adanya teknisi dan saya juga belum mendapatkan pedoman cara pemakain alat tersebut, serta untuk daya listrik disini juga masih kecil. Lalu faktor penghambat lainnya itu bisa dari dirinya si PM, kesadaran si PMnya itu bagaimana. Jadi kita tuh harus ekstra sabar untuk menanganinya mereka, menurut saya sih jalan terbaik untuk mereka harus jadi teman mereka dulu, saya harus jadi orang yang mereka percaya dulu.” (wawancara 5 Juni 2023)

Saudara AP sebagai ex-penerima manfaat juga menambahkan:

“Ya itu kalau mendukung tuh sarana dan prasarananya ada, alat-alatnya lengkaplah. Kalau instrukturinya itu ya sudah menguasai, sudah pengalaman. Kalau untuk hambatannya itu diperakitan viar masalah dimaterial, sedangkan hambatan pada program disini itu karena zona kerjanya dirubah, makanya jumlah PMnya saat ini

sedikit. Jadi ya ada beberapa vokasional yang kurang berjalan karena tidak ada Penerima Manfaatnya, kaya vokasional pertanian, perikanan dan untuk bantuan modal usaha itu tidak semua PM dapat.” (wawancara 21 Juni 2023)

Saudara AH sebagai ex-penerima manfaat juga menambahkan:

“... untuk faktor penghambatnya ya bantuannya sih ya kalau di saya, karena cuma dapat gerobak sama uang. Kalau untuk bahan pokok dagangan kaya biji jagung itu saya harus meminta tolong untuk dibelikan kepada konselor, uangnya dari saya dan konselor yang belikan. Jadikan saya harus nunggu dibelikan dahulu oleh beliau, jadi kalau posisinya barang baku saya sudah habis dan saya belum dibelikan bahan untuk jualan, ya jadinya saya libur jualan dulu.” (wawancara 9 Juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program vokasional yang dilakukan oleh pihak Sentra Galih pakuan Bogor terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat sendiri dalam pelaksanaannya. Dimana faktor pendukung yaitu dengan adanya sumber daya manusia seperti pekerja sosial, konselor, dan instruktur vokasional. Adanya dukungan dan motivasi dari pekerja sosial dan konselor. Selain itu faktor pendukung dalam hal ini salah satunya sarana dan prasarana yang ada. Serta dari hasil vokasional yang ada, seperti hasil dari desain dan sablon baju, ada juga dari hasil pertanian itu diperjual belikan saat adanya pameran.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan melalui program vokasional adalah penerima manfaat yang jumlahnya masih sedikit akibat adanya kebijakan baru. Lain dari itu hambatan yang ada dilihat dari dalam diri Penerima Manfaat, karena beberapa dari mereka masih membatasi diri dan tertutup, seperti belum sungguh-sungguh untuk berubah. Selain itu untuk instruktur belum ada kualifikasi atau

kriteria khusus dalam bidangnya. Beberapa vokasional yang kurang berjalan karena tidak ada penerima manfaat, seperti vokasional pertanian, perikanan. Dalam hal sarana dan prasarana ada alat yang tidak bisa dimanfaatkan, karena belum ada yang bisa mengoprasikannya. Tidak adanya keberlanjutan MoU antar pihak Sentra dengan mitra-mitra dalam hal penyaluran magang penerima manfaat untuk bekerja, serta untuk bantuan modal usaha itu tidak semua penerima manfaat dapat.